

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi.

Tujuan umum Laporan Keuangan SKPD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi;
- 6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan ini terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran ;
- b) Neraca ;
- c) Laporan Operasional ;
- d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan;

- b) Belanja;
- c) Transfer ;
- d) Surplus/Defisit ;
- e) Pembiayaan ;
- f) Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran

Neraca

Neraca Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Kami mengklasifikasikan aset dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Kami mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima kembali atau dibayar kembali dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a) Kas dan setara kas ;
- b) Investasi jangka pendek ;
- c) Piutang pajak dan bukan pajak ;
- d) Persediaan ;
- e) Investasi jangka panjang ;
- f) Aset tetap ;
- g) Kewajiban jangka pendek ;
- h) Kewajiban jangka panjang ;
- i) Ekuitas.

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional;
- b) Beban dari Kegiatan Operasional;
- c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional;
- d) Surplus/defisit-LO

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Kinerja APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 ;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021;
 30. Peraturan Bupati Brebes Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;
 31. Peraturan Bupati Brebes Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;
 32. Peraturan Bupati Brebes Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 108 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan disusun adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD	
	3.1	LRA
		3.1.1 Pendapatan_LRA
		3.1.2 Belanja
	3.2	LO
		3.2.1 Pendapatan –LO
		3.2.2 Beban
		3.2.3 Kegiatan Non Operasional
		3.2.4 Pos Luar Biasa
	3.3	Laporan Perubahan Ekuitas
		3.3.1 Perubahan Ekuitas
	3.4	Neraca
		3.4.1 Aset
		3.4.2 Kewajiban
		3.4.3 Ekuitas
	3.5	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.
	3.6	Laporan Arus Kas BLUD
	3.7	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD
Bab IV	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD	
Bab V	Penutup	

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target Kinerja APBD. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.

Untuk memberikan gambaran secara jelas ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel bawah ini :

1. Tabel pencapaian target dan realisasi pendapatan

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Pendapatan Asli Daerah	146.325.000.000,00	150.333.758.117,00	4.008.758.117,00	102,74%
2	Pendapatan Transfer			-	
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah			-	
	JUMLAH PENDAPATAN	146.325.000.000,00	150.333.758.117,00	4.008.758.117,00	102,74%

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1	Pajak Daerah	146.325.000.000,00	150.333.758.117,00	4.008.758.117,00	102,74%
2	Retribusi Daerah			-	
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-	
4	Lain-lain PAD yang Sah			-	
	Jumlah PAD	146.325.000.000,00	150.333.758.117,00	4.008.758.117,00	102,74%

b. Pendapatan Transfer

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA BERIMBANGAN				
1	Dana Bagi Hasil Pajak				
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
3	Dana Alokasi Umum				
4	Dana Alokasi Khusus				
	Jumlah				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
1	Dana Otonomi Khusus				
2	Dana Penyesuaian				
	Jumlah				
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Jumlah				
	Jumlah Pendapatan Transfer				

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
1	Pendapatan Hibah				
2	Pendapatan Dana Darurat				
3	Pendapatan Lain-lain				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah				

Kinerja mengenai anggaran pendapatan dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Realisasi pendapatan sebesar Rp. 150.333.758.117 dari target yang ditetapkan Rp. 146.325.000.000 atau 102.74%.

2. Tabel pencapaian target dan realisasi belanja

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Belanja Pegawai	10.031.349.310,00	9.770.875.126,00	(260.474.184,00)	97,40%
2	Belanja Barang dan Jasa	6.539.699.479,00	6.246.541.741,00	(293.157.738,00)	95,52%
3	Belanja Modal	2.480.191.340,00	2.358.288.134,00	(121.903.206,00)	95,08%
	Jumlah	19.051.240.129,00	18.375.705.001,00	(675.535.128,00)	96,45%

Kinerja mengenai anggaran belanja dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 9.770.875.126,00 dari anggaran yang ditetapkan Rp. 10.031.349.310,00 atau 97,40%.
- b. Realisasi Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 6.246.541.741,00 dari anggaran yang ditetapkan Rp. 6.539.699.479,00 atau 95,52%.
- c. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 2.358.288.134,00 dari anggaran yang ditetapkan Rp. 2.480.191.340,00 atau 95,08%.

Secara keseluruhan realisasi belanja mencapai 96,45% dari yang dianggarkan.

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Penghindaran Kewajiban Pembayaran Pajak, misalnya Wajib pajak cenderung menyembunyikan transaksi yang sebenarnya untuk menghindari/mengurangi pajak yang dikenakan;
2. Jangkauan pelayanan perbankan yang kurang luas dan keterbatasan waktu pelayanan perbankan di wilayah desa terpencil;
3. Wajib Pajak Kurang Pro Aktif untuk melaporkan ketika ada perubahan data Objek Pajak, terdapat Objek Pajak yang tidak diketahui Domisili Wajib Pajaknya tetapi data di SPPT masih menggunakan alamat Wajib Pajak lama (lahan sudah terjual atau berpindahtangan);
4. Penyampaian SPPT dari Desa/Kelurahan ke Wajib Pajak seringkali terlambat hingga akhir tahun;
5. Perangkat desa meninggal atau pensiun tetapi masih menyisakan data tunggakan PBB-P2, selanjutnya digantikan oleh perangkat desa baru yang belum memahami letak objek pajak dan wajib pajak PBB-P2;
6. Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara mandiri melalui kanal-kanal pembayaran yang ada tanpa perlu menitipkan ke pamong.

Untuk mengatasi masalah yang ditemukan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bapenda menempuh cara sebagai berikut:

1. Membangun Aplikasi Sipentol (Sistem Pendataan Tanah Online) sebagai sarana dalam melaksanakan pemutakhiran dan pembentukan basis data pajak daerah pada kegiatan pendataan PBB P2;
2. Pemasangan alat Taping Box pada Wajib pajak menghasilkan perekaman transaksi yang sebenarnya, sehingga potensi pajak yang dikenakan dapat sesuai. Hal ini menekan lost potensi pendapatan pajak
3. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara mandiri melalui kanal -kanal pembayaran secara langsung;
4. Memberikan apresiasi kepada pemungut pajak perangkat desa yang tertib administrasi dan lunas tercepat dan bagi wajib pajak yang tertib dan tercepat dalam membayar pajak daerah;
5. Pendataan ulang terkait data-data wajib pajak yang berubah karena faktor jual beli / pindah kepemilikan, perubahan status dari tanah tanpa bangunan menjadi tanah ada bangunan;

BAB III**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN****3.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD****PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN****3.1.1 Pendapatan**

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh daerah. Ikhtisar Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	146.325.000.000,00	150.333.758.117,00	102,74%	124.425.548.718,00
b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan				
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah				
Jumlah	146.325.000.000,00	150.333.758.117,00	102,74%	124.425.548.718,00

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2021, maka realisasi pendapatan yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 25.908.209.399,00 atau 20,82%.

Realisasi masing-masing Pendapatan Daerah dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar Rp. 146.325.000.000,00 Realisasi sebesar Rp. 150.333.758.117,00 atau 1,03%. Realisasi secara rinci dengan komposisi sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Pajak Daerah	146.325.000.000,00	150.333.758.117,00	1,03	124.425.548.718,00
b. Retribusi daerah				
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah				
d. Lain-Lain PAD yang sah				
Jumlah	146.325.000.000,00	150.333.758.117,00	1,03	124.425.548.718,00

a. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi pendapatan dari pajak daerah melebihi target sebesar Rp. 4.008.758.117,00 atau realisasi mencapai Rp. 150.333.758.117,00

Realisasi secara rinci dapat dirinci sebagai berikut :

Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Pajak Hotel	350.000.000	404.695.532	115,63	347.834.423
Pajak Restoran	4.680.000.000	5.443.995.193	116,32	3.452.737.139
Pajak Hiburan	275.000.000	315.932.383	114,88	175.127.470
Pajak Reklame	3.700.000.000	3.613.868.752	97,67	3.517.961.866
Pajak Penerangan Jalan	64.150.000.000	64.410.760.959	100,41	51.273.016.368
Pajak Parkir	350.000.000	399.207.377	114,06	226.220.504
Pajak Air Tanah	820.000.000	855.445.319	104,32	747.087.264
Pajak Sarang Burung Walet				
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000	275.168.846	55,03	475.519.801
Pajak Bumi dan Bangunan	45.000.000.000	46.081.576.289	102,40	40.812.300.672
Pajak Lingkungan				
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	26.500.000.000	28.533.107.467	107,67	23.397.743.211
Jumlah	146.325.000.000	150.333.758.117	102,74	124.425.548.718

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dapat terealisasi Rp 0,00 dari target sebesar Rp 0,00 sebagaimana rincian berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Jasa Usaha				
Retribusi Perizinan Tertentu				
Jumlah				

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp. 0,00 dari yang direncanakan sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN				

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD				
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta				
Jumlah				

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah sebesar Rp. 0,00 dari yang direncanakan sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Lain-Lain PAD yang Sah :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Hasil Penjualan BMD Yang Tdk Dipisahkan				
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan				
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan				
Hasil Kerja Sama Daerah				
Jasa Giro Kas Daerah				
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir				
Pendapatan Bunga				
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah				
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain				
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing				
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				
Pendapatan Denda Pajak Daerah				
Pendapatan Denda Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan				
Pendapatan dari Pengembalian				
Pendapatan BLUD				
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan				
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir				
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)				
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah				

Lain-Lain PAD yang Sah :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf				
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA				
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA				
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA				
Jumlah				

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar Rp.0,00 Realisasi sebesar Rp 0,00. Realisasi secara rinci dengan sebagai berikut:

Pendapatan Transfer :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
Pendapatan Transfer Antar Daerah				
JUMLAH				

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar Rp0,00 Realisasi sebesar Rp 0,00. Realisasi secara rinci dengan sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Pendapatan Hibah				
Dana Darurat				
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
JUMLAH				

3.1.2 Belanja

Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2022 yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran sebesar Rp. 18.375.705.001,00 dari anggaran Rp. 19.051.240.129,00 dengan perincian sebagai berikut:

Belanja :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Operasi	16.571.048.789,00	16.017.416.867,00	96,66	12.822.718.631,00
b. Belanja Modal	2.480.191.340,00	2.358.288.134,00	95,08	1.931.711.650,00
c. Belanja Tak Terduga				
d. Belanja Transfer				
Jumlah	19.051.240.129,00	18.375.705.001,00	96,45	14.754.430.281,00

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Dalam Tahun Anggaran 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes merealisasikan belanja operasi sebesar Rp. 16.017.416.867,00 dari anggaran sebesar Rp. 16.571.048.789,00. Komposisi realisasi belanja operasi sebagai berikut :

Belanja Operasi :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Belanja Pegawai	10.031.349.310,00	9.770.875.126,00	97,40	8.440.577.934,00
Belanja Barang dan Jasa	6.539.699.479,00	6.246.541.741,00	95,52	4.382.140.697,00
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah	16.571.048.789,00	16.017.416.867,00	96,66	12.822.718.631,00

a. Rincian/penjelasan Belanja Pegawai sebagai berikut :

Belanja Pegawai :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Gaji dan Tunjangan	1.983.722.074,00	1.945.914.084,00	98,09	1.806.863.292,00
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.507.238.055,00	1.370.462.650,00	90,93	1.031.339.830,00
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.987.542.181,00	4.901.651.392,00	98,28	4.257.176.812,00
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	1.552.847.000,00	1.552.847.000,00	100,00	1.345.198.000,00
e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH				
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH				
g. Belanja Pegawai BOS				
h. Belanja Pegawai BLUD				
Jumlah	10.031.349.310,00	9.770.875.126,00	97,40	8.440.577.934,00

b. Rincian/penjelasan Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Barang	1.759.200.860,00	1.647.928.533,00	93,67	1.030.501.330,00
b. Belanja Jasa	3.224.680.000,00	3.101.878.750,00	96,19	2.196.155.290,00
c. Belanja Pemeliharaan	280.077.000,00	274.287.880,00	97,93	242.148.120,00
d. Belanja Perjalanan Dinas	1.275.741.619,00	1.222.446.578,00	95,82	913.335.957,00
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-		-
f. Belanja Barang dan Jasa BOS		-		
g. Belanja Barang dan Jasa BLUD		-		
J u m l a h	6.539.699.479,00	6.246.541.741,00	95,52	4.382.140.697,00

1) Belanja Barang merupakan belanja barang persediaan sesuai rincian sebagai berikut :

Belanja Barang :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Barang Pakai Habis	1.759.200.860,00	1.647.928.533,00	93,67	1.030.501.330,00
b. Belanja Barang Tak Habis Pakai				
c. Belanja Barang Bekas Dipakai				
J u m l a h	1.759.200.860,00	1.647.928.533,00	93,67	1.030.501.330,00

Rincian Belanja Barang Pakai Habis dijelaskan sebagai berikut:

	Belanja Barang :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
	Belanja Barang Pakai Habis				
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi				
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia				
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	48.000.000,00	47.990.900,00	99,98	43.574.600,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku				
5	Belanja Bahan-Bahan Kimia Nuklir				
6	Belanja Bahan-Barang dalam Proses				
7	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman				
8	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran				
9	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	5.115.000,00	5.106.000,00	99,82	3.745.000,00
10	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan				
11	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	160,00	-	0,00	-
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan				

	Belanja Barang :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar				
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran				
15	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium				
16	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar				
17	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi				
18	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian				
19	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel				
20	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial				
21	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya				
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	222.036.200,00	210.743.310,00	94,91	170.659.030,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	668.716.440,00	644.682.390,00	96,41	449.751.700,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	22.240.000,00	22.200.000,00	99,82	25.590.000,00
26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender				
27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	594.000,00	-	0,00	-
28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.822.000,00	5.822.000,00	100,00	11.766.000,00
29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.844.900,00	10.844.900,00	100,00	8.516.000,00
30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	8.700.000,00	7.320.000,00	84,14	4.610.000,00
31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa				
32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga				

	Belanja Barang :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
33	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	329.494.160,00	290.176.733,00	88,07	41.120.000,00
34	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	59.120.000,00	55.449.000,00	93,79	6.733.000,00
35	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH				
36	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD				
37	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)				
38	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)				
39	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)				
40	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	25.905.000,00	24.680.800,00	95,27	3.900.000,00
41	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)				
42	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)				
43	Belanja Pakaian Penyelamatan				
44	Belanja Pakaian Siaga				
45	Belanja Pakaian Teknik				
46	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja				
47	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium				
48	Belanja Pakaian Kerja Bengkel				
49	Belanja Pakaian KORPRI				
50	Belanja Pakaian Adat Daerah				
51	Belanja Pakaian Batik Tradisional				21.000.000,00
52	Belanja Pakaian Olahraga	22.000.000,00	21.978.000,00	99,90	
53	Belanja Pakaian Paskibraka				
54	Belanja Pakaian Jas/Safari				
55	Belanja Obat-Obatan-Obat				
56	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya				
57	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				
58	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain				
59	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga				

	Belanja Barang :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
60	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya				
61	Belanja Natura dan Pakan-Natura	58.760.000,00	57.161.500,00	97,28	128.780.000,00
62	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	255.953.000,00	234.238.000,00	91,52	75.485.000,00
63	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.900.000,00	9.535.000,00	59,97	35.271.000,00
64	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh				
65	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan				
66	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan				
67	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial				
68	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				
69	Belanja Natura dan Pakan-Pakan				
70	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya				
71	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi				
72	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya				
73	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi				
74	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya				
75	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses				
76	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya				
	J u m l a h	1.759.200.860,00	1.647.928.533,00	93,67	1.030.501.330,00

2) Belanja Jasa sebesar Rp. 3.101.878.750,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Jasa :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Jasa Kantor	3.070.970.000,00	2.954.949.628,00	96,22	2.030.856.730,00
b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.050.000,00	5.784.920,00	95,62	3.658.560,00
c. Belanja Sewa Tanah				
d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	90.660.000,00	86.623.872,00	95,55	13.640.000,00
e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.000.000,00	-	0,00	-
f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi				
g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya				
h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.000.000,00	4.900.000,00	98,00	148.000.000,00
i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	49.620.330,00	99,24	-
j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)				
k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				
l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				
m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah				
n. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah				
J u m l a h	3.224.680.000,00	3.101.878.750,00	96,19	2.196.155.290,00

3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 274.287.880,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pemeliharaan :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Pemeliharaan Tanah				
b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	211.692.000,00	206.827.880,00	97,70	107.278.120,00
c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	68.385.000,00	67.460.000,00	98,65	134.870.000,00
d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				
J u m l a h	280.077.000,00	274.287.880,00	97,93	242.148.120,00

- 4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.222.446.578,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belana Perjalanan Dinas :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.275.741.619,00	1.222.446.578,00	95,82	913.335.957,00
b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri				
J u m l a h	1.275.741.619,00	1.222.446.578,00	95,82	913.335.957,00

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi berupa pengeluaran untuk perolehan aset tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya serta belanja modal aset tidak berwujud. Realisasi belanja modal dalam Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 2.358.288.134,00 dari anggaran sebesar Rp. 2.480.191.340,00 dengan rincian:

Belanja Modal :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Modal Tanah	-	-		-
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.883.926.340,00	1.764.015.934,00	93,64	1.193.546.650,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	506.265.000,00	504.673.000,00	99,69	738.165.000,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-		-
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.000.000,00	89.599.200,00	99,55	-
f. Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-
Jumlah	2.480.191.340,00	2.358.288.134,00	95,08	1.931.711.650,00

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal Tanah :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Modal Tanah				
b. Belanja Modal Tanah BLUD				
Jumlah				

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.764.015.934,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Peralatan dan Mesin :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Modal Alat Besar				4.500.000,00
b. Belanja Modal Alat Angkutan	994.496.000,00	912.119.042,00	91,72	-
c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.472.000,00	-	0,00	-
d. Belanja Modal Alat Pertanian				
e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	381.554.250,00	363.717.300,00	95,33	376.767.650,00
f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	37.918.000,00	36.099.095,00	95,20	91.100.000,00
g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan				
h. Belanja Modal Alat Laboratorium				
i. Belanja Modal Komputer	466.486.090,00	452.080.497,00	96,91	721.179.000,00
j. Belanja Modal Alat Eksplorasi				
k. Belanja Modal Alat Pengeboran				
l. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian				
m. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi				
n. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja				
o. Belanja Modal Alat Peraga				
p. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi				
q. Belanja Modal Rambu-Rambu				
r. Belanja Modal Peralatan Olahraga				
s. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS				
t. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				
Jumlah	1.883.926.340,00	1.764.015.934,00	93,64	1.193.546.650,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 504.673.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Gedung dan Bangunan :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Modal Bangunan Gedung	506.265.000,00	504.673.000,00	99,69	597.665.000,00
b. Belanja Modal Monumen				
c. Belanja Modal Bangunan Menara				
d. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-		140.500.000,00
e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				
Jumlah	506.265.000,00	504.673.000,00	99,69	738.165.000,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan				
b. Belanja Modal Bangunan Air				
c. Belanja Modal Instalasi				
d. Belanja Modal Jaringan				
e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD				
Jumlah				

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 89.599.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Aset Tetap Lainnya :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan				
b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga				
c. Belanja Modal Hewan				
d. Belanja Modal Biota Perairan				
e. Belanja Modal Tanaman				
f. Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya				
g. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi				
h. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	90.000.000,00	89.599.200,00	99,55	-
i. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS				
j. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD				
Jumlah	90.000.000,00	89.599.200,00	99,55	-

3.2 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun. Laporan operasional menyajikan pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa.

3.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Brebes yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2022 dan 2021.

Pendapatan-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp. 157.604.966.028,33 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Pendapatan-LO				
1. Pendapatan Asli Daerah – LO	157.604.966.028,33	129.315.063.116,00	(28.289.902.912,33)	(21,88)
2. Pendapatan Transfer – LO			-	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO			-	
Jumlah	157.604.966.028,33	129.315.063.116,00	(28.289.902.912,33)	(21,88)

1. Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2022 adalah sebesar Rp. 157.604.966.028,33 dengan rincian sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Pendapatan Asli Daerah-LO				
a. Pendapatan Pajak Daerah – LO	157.604.966.028,33	129.315.063.115,00	(28.289.902.913,33)	(21,88)
b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO	-	-	-	
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	-	-	-	
d. Lain-lain PAD Yang Sah – LO	-	-	-	
Jumlah	157.604.966.028,33	129.315.063.115,00	(28.289.902.913,33)	(21,88)

a. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Pendapatan Pajak Daerah – LO				
a. Pajak Hotel-LO	404.695.532,00	347.834.423,00	(56.861.109,00)	(16,35)
b. Pajak Restoran-LO	5.443.995.193,00	3.452.599.717,00	(1.991.395.476,00)	(57,68)
c. Pajak Hiburan-LO	315.932.383,00	175.127.470,00	(140.804.913,00)	(80,40)
d. Pajak Reklame-LO	3.407.224.153,33	3.612.767.970,00	205.543.816,67	5,69
e. Pajak Penerangan Jalan-LO	64.410.760.959,00	51.273.016.368,00	(13.137.744.591,00)	(25,62)
f. Pajak Parkir-LO	399.207.377,00	226.220.504,00	(172.986.873,00)	(76,47)
g. Pajak Air Tanah-LO	893.884.509,00	734.949.290,00	(158.935.219,00)	(21,63)
h. Pajak Sarang Burung Walet-LO	-	-	-	
i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	275.168.846,00	475.519.801,00	200.350.955,00	42,13
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	53.520.989.609,00	45.619.284.361,00	(7.901.705.248,00)	(17,32)
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	28.533.107.467,00	23.397.743.211,00	(5.135.364.256,00)	(21,95)
l. Pajak Lingkungan - LO			-	
Jumlah	157.604.966.028,33	129.315.063.115,00	(28.289.902.913,33)	(21,88)

b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Pajak Retribusi Daerah - LO adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Pendapatan Retribusi Daerah – LO				
a. Retribusi Jasa Umum-LO				
b. Retribusi Jasa Usaha-LO				
c. Retribusi Perizinan Tertentu-LO				
Jumlah				

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO				
a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO				

	Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
		Tahun 2022	Tahun 2021		
b.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO				
c.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO				
	Jumlah				

d. Lain-lain PAD yang Sah - LO

Lain-lain PAD yang Sah – LO adalah sebagai berikut :

	Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
		Tahun 2022	Tahun 2021		
	Lain-lain PAD yang Sah-LO				
a.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO				
b.	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO				
c.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO				
d.	Hasil Kerja Sama Daerah-LO				
e.	Jasa Giro-LO				
f.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO				
g.	Pendapatan Bunga-LO				
h.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO				
i.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO				
j.	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO				
k.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO				
l.	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO				
m.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO				
n.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO				
o.	Pendapatan dari Pengembalian-LO				
p.	Pendapatan dari BLUD-LO				
q.	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO				

	Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
		Tahun 2022	Tahun 2021		
r.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO				
s.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO				
t.	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO				
u.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO				
v.	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf -LO				
w.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan -LO				
x.	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO				
y	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO				
	Jumlah				

2. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer – LO tahun 2022 adalah sebesar Rp 0,00 dengan rincian sesuai tabel berikut :

	Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
		Tahun 2022	Tahun 2021		
	Pendapatan Transfer – LO				
a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO				
b.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO				
c.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO				
d.	Bantuan Keuangan - LO				
	Jumlah				

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO tahun 2022 adalah sebesar Rp 179.857.000,00 merupakan hibah berupa mobil Mobil Toyota Rush GR/MT dari Bank Jateng, sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO				
a. Pendapatan Hibah – LO	179.857.000,00	-	(179.857.000,00)	0%
b. Dana Darurat – LO			-	0%
c. Pendapatan Lainnya – LO			-	0%
Jumlah	179.857.000,00	-	(179.857.000,00)	0%

3.2.2 Beban

Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Beban				
a. Beban Operasi	18.290.060.577,20	16.650.408.089,57	(1.639.652.487,63)	(9,85)
b. Beban Transfer			-	
Jumlah	18.290.060.577,20	16.650.408.089,57	(1.639.652.487,63)	(9,85)

1. Rincian Beban Operasi sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
BEBAN OPERASI				
a. Beban Pegawai	10.348.305.584,00	8.832.124.338,00	(1.516.181.246,00)	(17,17)
b. Beban Persediaan	1.692.708.033,00	975.496.830,00	(717.211.203,00)	(73,52)
c. Beban Jasa	3.099.918.728,00	2.197.849.666,00	(902.069.062,00)	(41,04)
d. Beban Pemeliharaan	206.827.880,00	242.148.120,00	35.320.240,00	14,59
e. Beban Perjalanan Dinas	1.222.446.578,00	913.335.957,00	(309.110.621,00)	(33,84)
f. Beban Bunga			-	
g. Beban Subsidi			-	
h. Beban Hibah			-	
i. Beban Bantuan Sosial			-	
j. Beban Penyusutan dan Amortisasi	749.882.379,00	538.859.452,00	(211.022.927,00)	(39,16)
k. Beban Penyisihan Piutang	969.971.395,20	2.950.593.726,57	1.980.622.331,37	67,13
l. Beban Lain-lain			-	
Jumlah	18.290.060.577,20	16.650.408.089,57	(1.639.652.487,63)	(9,85)

a. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan Aset tetap	Nilai (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	649.379.611,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.782.928,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	71.719.840,00
	749.882.379,00

Beban penyusutan aset tetap tahun 2022 adalah sebesar Rp. 678.162.539,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp 649.379.611,00
b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp 28.782.928,00

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2022 berupa amortisasi software sebesar Rp. 71.719.840,00 Rincian Beban Amortisasi dan Akumulasi Amortisasi tahun 2022 sebagai berikut :

Nama Software	Umur s.d 2022	Nilai Software	Amortisasi per tahun (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2021 (Rp)	Beban Amortisasi 2022 (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2022 (Rp)
Sistem Informasi Pendataan Tanah On Line (SIPENTOL)-Webbase	0	34.987.200,00	6.997.440,00	-	6.997.440,00	6.997.440,00
Pengembangan dan Update Sistem Informasi Objek Pajak	0	54.612.000,00	10.922.400,00	-	10.922.400,00	10.922.400,00
Aplikasi E-Potensi	1	95.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	38.000.000,00
Aplikasi SIPENTOL	1	94.500.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	37.800.000,00
SIM BPHTB	2	79.500.000,00	15.900.000,00	31.800.000,00	15.900.000,00	47.700.000,00
Anti Virus 6 User	8	6.100.000,00	1.220.000,00	6.100.000,00	-	6.100.000,00
Map Info 12	8	36.900.000,00	7.380.000,00	36.900.000,00	-	36.900.000,00
Earth Profesional	8	9.920.000,00	1.984.000,00	9.920.000,00	-	9.920.000,00
Windows Operating System	8	18.150.000,00	3.630.000,00	18.150.000,00	-	18.150.000,00
Office Home and Business	8	32.600.000,00	6.520.000,00	32.600.000,00	-	32.600.000,00
Adobe lightroom	8	4.000.000,00	800.000,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00
Map Info (Software)	9	36.850.000,00	7.370.000,00	36.850.000,00	-	36.850.000,00
Oracle 11g Standard+Form, Oracle Database Standar Edition+ATS, Oracle Internet Developer Suite+ATS	9	147.500.000,00	29.500.000,00	147.500.000,00	-	147.500.000,00
Aplikasi Software SIMPATDA	10	79.660.000,00	15.932.000,00	79.660.000,00	-	79.660.000,00
			-	-		-
Jumlah		730.279.200,00	-	441.380.000,00	71.719.840,00	513.099.840,00

e. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2022 sebesar Rp. 969.971.395,20 terdiri dari :

Beban Penyisihan Piutang :	Nilai (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	37.484.764,50
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan	
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	932.486.630,70
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	
Jumlah	969.971.395,20

2. Rincian Beban Transfer disampaikan sebagaimana tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
a. Beban Bagi Hasil				
b. Beban Bantuan Keuangan				
Jumlah				

3. Beban Tak Terduga tahun 2022 sebesar Rp. 0,00, adapun rincian penggunaan beban tak terduga adalah :

- a. Penggunaan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 0,00
- b. Penggunaan untuk darurat bencana sebesar Rp. 0,00
- c. Penggunaan untuk pengembalian pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp. 0,00

1.2.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
SURPLUS NON OPERASIONAL – LO				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	-		-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	2.666.662.269,71	19.315.959,93	2.647.346.309,78	13.705,49
JUMLAH	2.666.662.269,71	19.315.959,93	2.647.346.309,78	13.705,49
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO				

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
JUMLAH	-	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO	2.666.662.269,71	17.815.959,93	2.648.846.309,78	14.867,83

1. Surplus Non Operasional

Secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	
1	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	
2	Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	
3	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang- LO	
4	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO	
	Jumlah	
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	
1	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	
2	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	
3	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	
4	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO	
5	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
	Jumlah	
	Total	

Penjelasan :

a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO

Pada tahun 2022 dilaksanakan penjualan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp. 0,00. Barang-barang tersebut telah dijual dengan nilai buku Rp. 0,00 (nilai perolehan – nilai penyusutan). Penerimaan kas pada SKPD atas penjualan tersebut sebesar Rp 0,00 (hasil penjualan langsung disetor ke Kas Daerah). Selisih atas nilai jual terhadap nilai buku dicatat sebagai Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO sebesar Rp. 0,00

b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO sebesar Rp. 0,00

c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp. 2.666.662.269,71 merupakan penurunan nilai penyisihan piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan karena adanya penghapusan piutang kedaluarsa dan perubahan ketentuan.

2. Defisit Non Operasional

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	
1	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	
2	Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	
3	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	
	Jumlah	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	
1	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	
2	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	
3	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	
4	Defisit Penyelesaian Obligasi-LO	
5	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO	
6	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	
	Jumlah	-
	Total	-

Penjelasan :

a. Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO

Pada tahun 2022 dilaksanakan penjualan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp 0,00. Barang-barang tersebut telah dijual dengan nilai buku Rp. 0,00 (nilai perolehan – nilai penyusutan). Penerimaan kas pada OPD atas penjualan tersebut sebesar Rp 0,00 karena hasil penjualan langsung disetor ke Kas Daerah. Selisih atas nilai jual terhadap nilai buku dicatat sebagai Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO sebesar Rp. 0,00

b. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO sebesar Rp. 0,00

c. Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp. 0,00

3.2.4. Pos Luar Biasa

Pendapatan dari Pos Luar Biasa sebesar NIHIL dan Beban dari Pos Luar Biasa sebesar NIHIL.

3.3 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2022 dibandingkan dengan TA 2021.

Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 22.091.224.135,05** berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 18.159.108.262,11** ditambah Surplus-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 142.161.424.720,84** ditambah Dampak Kumulatif Perubahan/Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar (**Rp. 6.271.255.731,90**), dan Kewajiban

Untuk Dikonsolidasikan/Surplus-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 131.958.053.116,00.

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan/Kebijakan/Kesahan Mendasar sebagai berikut :

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Koreksi Ekuitas Lainnya	(6.271.255.731,90)	15.147.755.712,49
Jumlah	(6.271.255.731,90)	15.147.755.712,49

Koreksi ekuitas lainnya sebesar minus Rp. 6.271.255.731,90 merupakan selisih dari penambahan dan pengurangan koreksi ekuitas sesuai jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penambahan Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	2022 (Rp)
Serah Terima Kas Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Piutang/Beban Dibayar Dimuka Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Persediaan Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Aset Tetap Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Aset Lainnya Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Koreksi saldo awal Aset tetap (mutasi masuk antar SKPD tahun-tahun sebelumnya) - KOR+MM	
Koreksi saldo awal (inventarisasi barang belum tercatat/berlebih) - KOR+LBH	
Koreksi saldo awal Aset tetap (hibah masuk tahun-tahun sebelumnya) - KOR+HBM	
Koreksi saldo awal Aset tetap (atribusi nilai sertifikat tanah tahun-tahun sebelumnya) - KOR+SER	
Koreksi saldo awal Aset tetap (hilang pencatatan) - KOR+HCTT	
Koreksi saldo awal Aset tetap (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi) - KOR+/-TKAP	4.800.000,00
Koreksi saldo awal Aset tetap (Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi) - KOR+NKAP	
Koreksi saldo awal (pencatatan penilaian barang hasil inventarisasi) - KOR+NILAI	
Koreksi saldo awal tambah (reklasifikasi aset tetap penyesuaian kode permendagri 108)	
Pencatatan mutasi masuk aset tetap dari OPD - MM	
Penyesuaian akumulasi penyusutan penghapusan aset tetap	
Penyesuaian akumulasi penyusutan mutasi keluar aset tetap	-
Mutasi Masuk Barang Rusak Berat antar SKPD	
Pencatatan Koreksi Saldo Awal Piutang	
Pencatatan Koreksi Saldo Awal Penyisihan Piutang	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Jasa Ex-Dana Bergulir	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Pokok Ex-Dana Bergulir	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Denda keterlambatan	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang TGR karena setoran atau pengurangan nilai piutang TGR	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Pajak	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Denda Pajak	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Retribusi	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang BLUD	
Koreksi saldo awal Utang Jangka Pendek Lainnya karena	
Mutasi masuk barang persediaan dari SKPD/Unit ...	
Reklasifikasi persediaan ke ekstrakomtabel	

Uraian	2022 (Rp)
Koreksi saldo awal kas	
Pengembalian piutang POKOK ex-Dana Bergulir Dinas Koperasi, penerimaan kas di PPKD piutang dicatat di Dinas Koperasi	
Pengembalian piutang POKOK ex-Dana Bergulir kepada masyarakat, penerimaan kas di PPKD piutang dicatat di SKPD pengelola (non Dinas Koperasi)	
Penyesuaian penyisihan piutang atas penerimaan piutang TGR Khusus PPKD	
Koreksi Saldo Awal Utang Lebih Bayar DBH Pusat	
Pengurangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pusat	
Pengurangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	
Pengurangan penyisihan piutang bagian laba/deviden atas PMPD pada BUMD	
Jumlah	4.800.000,00

2. Pengurangan Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	2022 (Rp)
Serah Terima Kas Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Piutang/Beban Dibayar Dimuka Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Persediaan Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Aset Tetap Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Aset Lainnya Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Kewajiban/Utang/Pendapatan Diterima Dimuka Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Koreksi saldo awal Aset tetap (penghapusan tahun-tahun sebelumnya) - KOR-HPS	
Koreksi saldo awal Aset tetap (mutasi keluar antar SKPD tahun-tahun sebelumnya) - KOR-MUT	
Koreksi saldo awal Aset tetap (perubahan batas nilai kapitalisasi) - KOR-NKAP	
Koreksi saldo awal kurang (pemeliharaan tahun-tahun sebelumnya) - KOR-PEMEL	
Koreksi saldo awal Aset tetap (dobel pencatatan) - KOR-DOB	
Koreksi saldo awal Aset tetap (seharusnya merupakan barang habis pakai tahun-tahun sebelumnya) - KOR-BHP	
Koreksi saldo awal Aset tetap (hibah keluar tahun-tahun sebelumnya) - KOR-HB	
Koreksi saldo awal kurang (reklasifikasi aset tetap penyesuaian kode permendagri 108)	
Koreksi saldo awal kurang (pengurangan nilai KDP)	
Reklasifikasi aset tetap ke Ekstracomptable (E)	
Pencatatan mutasi keluar aset tetap ke OPD - MUT	266.350.000,00
Penghapusan barang Baik (B)/Rusak Ringan (RR) - HPS	
Koreksi saldo akumulasi penyusutan awal Aset tetap	4.800.000,00
Penyesuaian akumulasi penyusutan mutasi masuk aset tetap	
Koreksi saldo awal aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD) karena	
Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Barang RB/TD	
Koreksi saldo awal Akumulasi Amortisasi ATB	
Mutasi Keluar Barang Rusak Berat antar SKPD	
Penghapusan Aset Lain-Lain - Aset Tidak Berwujud Software	
Penghapusan Piutang Kedaluarsa	5.817.085.426,90
Pengembalian pokok ex-Dana Bergulir, penerimaan kas di PPKD	
Koreksi saldo awal utang belanja karena	
Koreksi saldo awal piutang karena perubahan ketetapan	187.820.305,00
Mutasi keluar barang persediaan ke SKPD/Unit	
Reklasifikasi persediaan ke Kadaluarsa/Usang/Rusak	
Koreksi saldo awal beban dibayar di muka	
Penyesuaian saldo awal Pendapatan diterima di muka	
Jumlah	6.276.055.731,90

3.4 PENJELASAN POS-POS NERACA

3.4.1 ASET

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Th. 2022	Th. 2021
ASET		
Aset Lancar	21.173.208.861,07	18.055.756.977,46
Aset Tetap	4.293.639.619,00	2.717.246.224,00
Aset Lainnya	217.179.360,00	199.300.000,00
Jumlah Aset	25.684.027.840,07	20.972.303.201,46
KEWAJIBAN & EKUITAS		
Kewajiban	3.592.803.705,02	2.813.194.939,35
Ekuitas	22.091.224.135,05	18.159.108.262,11
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	25.684.027.840,07	20.972.303.201,46

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Th. 2022	Th. 2021
Kas	-	
Piutang	35.336.425.121,04	33.870.884.611,94
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(14.173.441.259,97)	(15.870.132.134,48)
Persediaan	10.225.000,00	55.004.500,00
Beban Dibayar Dimuka		
Jumlah Aset Lancar	21.173.208.861,07	18.055.756.977,46

A. KAS

Saldo kas terdiri atas Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di JKN dan Kas Lainnya dengan rincian sesuai tabel berikut:

Uraian	Th. 2022	Th. 2021
KAS		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Penerimaan	-	
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Jumlah	-	-

B. PIUTANG

Saldo piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 35.336.425.121,04 dengan rincian dijelaskan sesuai lampiran :

Jenis Piutang	Th. 2022	Th. 2021
Piutang Pendapatan :		
Piutang Pajak Daerah	28.677.796.139,50	28.472.033.647,00
Piutang Retribusi Daerah		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	6.658.628.981,54	5.398.850.964,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya :		
Piutang Lainnya		
Jumlah	35.336.425.121,04	33.870.884.611,00

1) Piutang Pendapatan**a) Piutang Pajak Daerah**

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan pajak daerah, sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum diterima, Saldo Piutang Pajak Daerah sebesar Rp. 51.081.098.766,00 dengan rincian sesuai tabel berikut :

Piutang Pajak :	Th. 2022	Th. 2021
Piutang Pajak Hotel		
Piutang Pajak Restoran		
Piutang Pajak Hiburan		
Piutang Pajak Reklame	242.347.325,00	249.926.844,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan		
Piutang Pajak Parkir		-
Piutang Pajak Air Tanah	117.035.042,50	78.595.852,50
Piutang Pajak Sarang Burung Walet		
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	28.310.859.663,00	28.135.956.842,00
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.554.109,00	7.554.109,00
Piutang Pajak Lingkungan		
Jumlah	28.677.796.139,50	28.472.033.647,50

Mutasi Piutang Pajak dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo awal Piutang Pajak	28.472.033.647,50
Penambahan :	
a. Penambahan piutang atas transaksi tahun 2022	51.081.098.766,00
b. Koreksi tambah/salah catat saldo piutang tahun lalu	
c. dst	
Pengurangan :	
a. Setoran piutang tahun berjalan	46.212.785.061,00
b Koreksi kurang/salah catat saldo tahun lalu	4.662.551.213,00
c..... dst	
Saldo Akhir Piutang Pajak	28.677.796.139,50

Rincian Mutasi Piutang Pajak dijelaskan sebagai berikut :

Uraian Penambahan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Penambahan piutang transaksi 2021		
a. Piutang Pajak Reklame	114.062.900,00	
b. Piutang Pajak ABT	60.667.550,00	
c. Piutang PBB	50.906.368.316,00	
Jumlah	51.081.098.766,00	

Uraian Penambahan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Koreksi tambah/salah catat saldo piutang tahun lalu		
a. Piutang pajak		
b. Piutang pajak		
c. Piutang pajak		
Jumlah	-	

Uraian Pengurangan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Setoran piutang tahun berjalan		
a. Piutang Pajak Reklame	121.469.169,00	
b. Piutang Pajak ABT	22.228.360,00	
c. Piutang PBB	46.069.087.532,00	
Jumlah	46.212.785.061,00	

Uraian Pengurangan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Koreksi kurang/salah catat saldo tahun lalu		
a. Piutang Pajak Reklame	173.250,00	Koreksi Lebih Catat
b. Piutang PBB	187.647.055,00	Perubahan Ketetapan
c. Piutang PBB	4.474.730.908,00	Penghapusan Piutang Kedaluarsa
Jumlah	4.662.551.213,00	

b) Piutang Retribusi Daerah

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan retribusi daerah, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum diterima, Saldo Rekening Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp dengan rincian sesuai tabel berikut :

Piutang Reribusi Daerah :	Th. 2022	Th. 2021
Piutang Retribusi Jasa Umum		
Piutang Retribusi Jasa Usaha		
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		
Jumlah		

c) Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan daerah selain dari pajak dan retribusi daerah, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum diterima. Saldo piutang dimaksud adalah Rp. 0,00. Rincian Piutang tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :	Th. 2022	Th. 2021
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN		
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta		
Jumlah		

d) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan lain-lain PAD yang Sah, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum diterima. Saldo piutang dimaksud adalah Rp. 6.658.628.981,54. Rincian Piutang tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Th. 2022	Th. 2021
Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		
Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		
Piutang Hasil Kerja Sama Daerah		

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Th. 2022	Th. 2021
Piutang Jasa Giro		
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
Piutang Pendapatan Bunga		
Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		
Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing		
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	6.658.628.981,54	5.398.850.964,44
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah		
Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		
Piutang Pendapatan dari Pengembalian		
Piutang Pendapatan BLUD		
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		
Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		
Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		
Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf		
Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan		
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		
Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya		
Jumlah	6.658.628.981,54	5.398.850.964,44

Penjelasan :

Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp. 6.658.628.981,54 merupakan piutang kepada wajib pajak atas denda keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan. Rinciannya dijelaskan pada tabel berikut :

No	Uraian	Tahun Pajak	Nilai (Rp)
1	Pajak PBB	2014	325.967.559,30
2	Pajak PBB	2015	436.601.480,70
3	Pajak PBB	2016	504.433.535,10
4	Pajak PBB	2017	331.898.736,60
5	Pajak PBB	2018	677.089.331,10
6	Pajak PBB	2019	955.434.318,24
7	Pajak PBB	2020	1.112.884.468,80
8	Pajak PBB	2021	1.396.937.523,90
9	Pajak PBB	2022	917.382.027,80
	Jumlah		6.658.628.981,54

C. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dirinci sesuai penjelasan berikut :

1) Penyisihan Piutang Pendapatan

Jenis Piutang	Th. 2022	Th. 2021
Penyisihan Piutang Pendapatan		
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	9.038.924.865,40	11.668.102.370,61
Penyisihan Piutang Retribusi		
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.134.516.394,57	4.202.029.763,87
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah		
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya		
Jumlah	14.173.441.259,97	15.870.132.134,48

2) Penyisihan Piutang Lainnya

Jenis Piutang	Th. 2022	Th. 2021
Penyisihan Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bank		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman melalui BLUD		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka		
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Jumlah	-	-

D. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Rekening ini merupakan biaya yang belum merupakan kewajiban Pemkab Brebes untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu dan barang/jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga.

Saldo sebesar Rp. 0,00

E. PERSEDIAAN

Rekening ini menggambarkan harga perolehan persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dengan rincian saldo per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Persediaan :	Th. 2022	Th. 2021
Bahan	-	-
Suku Cadang	-	-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	10.225.000,00	55.004.500,00
Obat-obatan	-	-
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	-
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga	-	-
Natura dan Pakan	-	-
Persediaan Penelitian	-	-
Persediaan Dalam Proses	-	-
Persediaan Barang BOS	-	-
Jumlah	10.225.000,00	55.004.500,00

Penambahan dan pengurangan selama tahun 2022 dijelaskan pada tabel berikut :

Persediaan :	Saldo 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2022
Bahan		53.096.900,00	53.096.900,00	-
Suku Cadang		425.000,00	425.000,00	-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	55.004.500,00	1.295.199.133,00	1.339.978.633,00	10.225.000,00
Obat-obatan				-
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan				-
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga				-
Natura dan Pakan		299.207.500,00	299.207.500,00	-
Persediaan Penelitian				-
Persediaan Dalam Proses				-
Persediaan Barang BOS				-
Jumlah	55.004.500,00	1.647.928.533,00	1.692.708.033,00	10.225.000,00

Mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2022 secara rinci dijelaskan pada tabel berikut :

Penambahan :	Nilai (Rp)
SALDO AWAL	55.004.500,00
Koreksi (+) Saldo Awal	
Pengadaan / Pembelian	1.647.928.533,00
Reklas Dari Belanja Tdk Terduga	
Reklas Dari B. Modal	
Reklas Dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Reklas Dari B. Pegawai	
Reklas Dari B. Jasa	
Reklas Dari Pemeliharaan	
Mutasi / Transfer Masuk	
Hibah Masuk	
Hutang Persediaan	
Reklas Antar Beban Persediaan (+)	
Jumlah Penambahan	1.647.928.533,00
Koreksi (-) Saldo Awal	
Pemakaian	1.692.708.033,00
Mutasi Keluar	
Hibah Keluar	
Reklas Ke Aset Tetap	
Reklas Ke Ekstrakomtabel	
Reklas Ke Belanja Pegawai	
Reklas Ke Belanja Jasa	
Reklas Ke Belanja Pemeliharaan	
Pindah Ke Kadaluarsa/-Rusak	
Reklas Antar Beban Persediaan (-)	
Jumlah Pengurangan	1.692.708.033,00
SALDO AKHIR PERSEDIAAN	10.225.000,00

Saldo persediaan tidak termasuk di dalamnya persediaan yang telah kadaluarsa dan rusak. Mutasi barang kadaluarsa dan rusak selama tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Persediaan Kadaluarsa/Usang/Rusak	Saldo 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2022
Bahan				
Suku Cadang				
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor				
Obat-obatan				
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan				
Persediaan Utk Tujuan Strategis/ Bergaja-jaga				
Natura dan Pakan				
Persediaan Penelitian				
Persediaan Dalam Proses				
JUMLAH				

F. INVESTASI JANGKA PANJANG

Terdiri dari :

a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar NIHIL

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp. 0,00 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) kepada perusahaan daerah. Nilai ini berasal dari penambahan nilai penyertaan modal selama tahun 2022 dengan perhitungan metode ekuitas dan metode biaya.

G. ASET TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN

1. Aset Tetap

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Brebes berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset tetap yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2022 dan 2021. Perolehan aset tetap berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang didalamnya termasuk pengadaan aset tetap dalam tahun anggaran berkenaan dan/atau perolehan lainnya yang sah. Belanja yang tidak dikapitalisasi berdasarkan kebijakan akuntansi adalah Belanja Perjalanan Dinas, Belanja ATK, penggandaan dan sejenisnya.

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 4.293.639.619,00 dan Rp. 2.717.246.224,00 dengan rincian sebagai berikut :

Aset Tetap :	Th. 2022	Th. 2021
a. Tanah		
b. Peralatan dan Mesin	7.230.953.527,00	5.548.630.593,00
c. Gedung dan Bangunan	2.620.437.000,00	1.844.204.000,00
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
e. Aset Tetap Lainnya	-	-
f. Konstruksi dalam Pekerjaan		199.200.000,00
g. Akumulasi Penyusutan	(5.557.750.908,00)	(4.874.788.369,00)
Jumlah Aset Tetap	4.293.639.619,00	2.717.246.224,00

Mutasi aset tetap tahun 2022 sebagai berikut :

URAIAN JENIS	SALDO 2021	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 2022
a. Tanah				
b. Peralatan dan Mesin	5.548.630.593,00	1.948.672.934,00	266.350.000,00	7.230.953.527,00
c. Gedung dan Bangunan	1.844.204.000,00	776.233.000,00		2.620.437.000,00
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan				-
e. Aset Tetap Lainnya				-
f. Konstruksi dalam Pekerjaan	199.200.000,00		199.200.000,00	-
JUMLAH	7.592.034.593,00	2.724.905.934,00	465.550.000,00	9.851.390.527,00

1) Rincian **mutasi penambahan** aset tahun 2022 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Penambahan :	
1	Belanja Modal	2.268.688.934,00
2	Reklas Dari B. Pegawai	
3	Reklas Dari B. Jasa	4.900.000,00
4	Reklas Dari B. Persediaan	
5	Reklas Dari B. Pemeliharaan	67.460.000,00
6	Reklas Dari Persediaan Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ke-3	
7	Hibah Masuk (Pemerintah Pusat)	
8	Hibah Masuk (Pemerintah Provinsi)	
9	Hibah Masuk (Pihak Ke-3)	179.857.000,00
10	Hibah Masuk (Komite Sekolah)	
11	Mutasi Masuk	
12	Hutang Aset	
13	Reklas Dari Aset Lainnya (Rusak Berat)	
14	Reklas Dari Aset Lainnya (Detail Engineering)	
15	Reklas Aset Tetap Dari KDP	199.200.000,00
16	Koreksi Tambah (Mutasi Masuk Tahun Sebelumnya)	
17	Koreksi Tambah (Inventarisasi Barang Belum Tercatat/Berlebih)	
18	Koreksi Tambah (Hibah Masuk Tahun Sebelumnya)	
19	Koreksi Tambah (Atribusi Nilai Sertifikat Tanah Tahun Sebelumnya)	
20	Koreksi Tambah (Hilang Pencatatan)	
21	Koreksi Tambah (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi)	4.800.000,00
22	Koreksi Tambah (Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi)	
23	Koreksi Tambah (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap)	
24	Koreksi Tambah (Penilaian Aset Tetap)	
25	Koreksi Tambah (Reklasifikasi Detail Engineering Ke Aset Tetapnya Tahun Sebelumnya)	
26	Koreksi Tambah (.....)	
	Jumlah Penambahan	2.724.905.934,00

Penjelasan :

- a) Reklas dari Belanja Jasa merupakan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur – Jasa Desain Arsitektural yang diatribusikan ke dalam nilai Bangunan Gedung senilai Rp. 4.900.000,00 .

- b) Reklas dari Belanja Pemeliharaan merupakan Belanja Rehab Gedung yang menambah nilai Bangunan Gedung Kantor senilai Rp. 67.460.000,00.
- c) Hibah masuk dari Pemerintah Pihak ke-3 berupa Mobil Toyota Rush GR/MT dari Bank Jateng senilai Rp. 179.857.000,00
- d) Reklas Aset dari KDP merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021 yang sudah selesai pengerjaannya di tahun 2022 senilai Rp. 199.200.000,00.
- e) Koreksi Tambah senilai Rp. 4.800.000,00 merupakan Koreksi Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi RAM Server tahun sebelumnya.

2) Rincian **mutasi pengurangan** aset tahun 2022 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Pengurangan :	
1	Extrakomtable	
2	Reklas Ke B. Persediaan	
3	Reklas Ke B. Pemeliharaan	
4	Reklas Ke B. Perjalanan Dinas	
5	Reklas Ke B. Pegawai	
6	Reklas Ke B. Jasa	
7	Belanja Modal Untuk Pembayaran Hutang	
8	Hibah Keluar	
9	Mutasi Keluar	266.350.000,00
10	Reklas Dari Kdp Ke Aset Tetap	199.200.000,00
11	Rusak Berat (RB)	
12	Tidak Ditemukan (TD)	
13	Penghapusan Barang B/RR	
14	Reklas Ke Aset Tidak Berwujud (ATB)	
15	Koreksi Kurang (Penghapusan Tahun Sebelumnya)	
16	Koreksi Kurang (Mutasi Keluar Antar Opd Tahun Sebelumnya)	
17	Koreksi Kurang (Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi)	
18	Koreksi Kurang (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi)	
19	Koreksi Kurang (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap)	
20	Koreksi Kurang (Pemeliharaan Tahun Sebelumnya)	
21	Koreksi Kurang (Dobel Pencatatan)	
22	Koreksi Kurang (BHP Tahun Sebelumnya)	
23	Koreksi Kurang (Hibah Keluar Tahun Sebelumnya)	
24	Koreksi Kurang (.....)	
	Jumlah Pengurangan	465.550.000,00

Penjelasan :

- a) Mutasi keluar senilai Rp. 266.350.000,00 merupakan pengurangan aset tetap karena pemindahan hak pemakaian kepada OPD Lain yaitu:
- Dinas Sosial berupa Meja Kerja senilai Rp. 6.300.000,00
 - Dinkominfotik berupa Meja Kerja senilai Rp. 17.200.000,00 dan

- Satpol PP berupa Mobil Toyota senilai Rp. 242.850.000,00.
- b) Reklas dari KDP ke Aset Tetap merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021 yang sudah selesai pengerjaannya di tahun 2022 senilai Rp. 199.200.000,00.

3) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 199.200.000,00. Adapun rincian Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Nama Rekanan	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Kemajuan Fisik (%)	Nominal KDP (Rp)	Nominal Terhutang (Rp)
N I H I L						
Jumlah						

Mutasi Penambahan/Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian Pekerjaan	Saldo 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2022	Ket
<i>Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor</i>	199.200.000,00	-	199.200.000,00	-	<i>Fisik telah selesai</i>
JUMLAH	199.200.000,00	-	199.200.000,00	-	-

2. Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2022 tidak termasuk penyusutan atas aset tetap yang telah diusulkan penghapusannya dan telah dipindahbukukan ke kelompok Aset Lainnya akun Aset Lain-lain.

Mutasi Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2022 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.543.306.202,00	654.179.611,00	-	5.197.485.813,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	331.482.167,00	28.782.928,00	-	360.265.095,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Jumlah	4.874.788.369,00	682.962.539,00	-	5.557.750.908,00

Penambahan akumulasi penyusutan selama tahun 2022 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Uraian	Beban Penyusutan	Hibah Masuk	Mutasi Masuk	Koreksi Tambah	Jumlah Penambahan
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	649.379.611,00			4.800.000,00	654.179.611,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.782.928,00				28.782.928,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan					-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya					-
Jumlah	678.162.539,00	-	-	4.800.000,00	682.962.539,00

Pengurangan akumulasi penyusutan selama tahun 2022 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Penghapusan	Mutasi Keluar	Koreksi Kurang	Jumlah Pengurangan
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		-		-
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan				-
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan				-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya				-
Jumlah	-	-	-	-

H. DANA CADANGAN

Saldo Dana Cadangan Tahun 2022 sebesar NIHIL

I. ASET LAINNYA

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 730.279.200,00 dan Rp. 640.680.000,00 dengan rincian :

ASET LAINNYA	Saldo Th. 2022	Saldo Th. 2021
Tagihan Jangka Panjang		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tidak Berwujud	730.279.200,00	640.680.000,00
Aset Lain-lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(513.099.840,00)	(441.380.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah	217.179.360,00	199.300.000,00

Penambahan dan Pengurangan Aset Tidak Berwujud dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

ASET LAINNYA	Saldo Th. 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th. 2022
Tagihan Jangka Panjang				-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				-
Aset Tidak Berwujud	640.680.000,00	89.599.200,00		730.279.200,00
Aset Lain-lain				-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(441.380.000,00)	(71.719.840,00)		(513.099.840,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				-
Jumlah	199.300.000,00	17.879.360,00	-	217.179.360,00

1. Aset Tidak Berwujud

Aset tersebut merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp. 730.279.200,00. Saldo tersebut berupa software/aplikasi.

Penambahan Aset Tidak Berwujud merupakan pengadaan software/aplikasi tahun 2022 sebesar Rp. 89.599.200,00

2. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 513.099.840,00 Mutasi terdiri atas :

- a. Saldo awal Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2021 sebesar Rp. 441.380.000,00
- b. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2022 sebesar Rp. 71.719.840,00

3.4.2 Kewajiban

3.4.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, dengan saldo masing-masing sebesar Rp. 3.592.803.705,02 dan Rp. 2.813.194.939,35 dapat dirinci sebagai berikut :

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :	Saldo Th. 2022	Saldo Th. 2021
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
Utang Bunga	-	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :	Saldo Th. 2022	Saldo Th. 2021
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	1.172.623.313,02	973.384.983,35
Utang Belanja	2.420.180.392,00	1.839.809.956,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Jumlah	3.592.803.705,02	2.813.194.939,35

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo rekening Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp. 0,00 merupakan :

- a. Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran akan tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, sebesar Rp. 0,00
- b. Potongan Gaji yang belum disetorkan kepada pihak ke-3, berupa :
 - 1) Taspen sebesar Rp. 0,00
 - 2) Iurang Jaminan Kesehatan sebesar Rp. 0,00
 - 3) Iurang Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp. 0,00
 - 4) Iurang Jaminan Kecelakaan Kematian sebesar Rp. 0,00
 - 5) Taperum sebesar Rp. 0,00
 - 6) Iuran Wajib Pegawai sebesar Rp. 0,00
- c. Belanja yang telah direalisasikan namun belum dibayar kepada pihak ke-3 dan kas nya masih berada di rekening Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0,00

2. Utang Bunga

Utang Bunga merupakan reklasifikasi bagian lancar dari bunga pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2022 adalah NIHIL

3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan kepada pihak lain. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka sebesar per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.172.623.313,02.

Mutasi pendapatan diterima dimuka tahun 2022 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian Pendapatan Diterima di Muka	Saldo Th. 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th. 2022
Pajak Reklame Diterima Di Muka	973.384.983,35	1.172.623.313,02	973.384.983,35	1.172.623.313,02
				-
				-
Jumlah	973.384.983,35	1.172.623.313,02	973.384.983,35	1.172.623.313,02

Uraian	Nilai (Rp)
Uraian Kegiatan :	
Penerimaan pendapatan, diterima pada tanggal untuk jangka waktu	
Saldo Awal	973.384.983,35
Penambahan :	
Penambahan PDDM tahun 2022	1.172.623.313,02
Koreksi tambah salah catat saldo tahun sebelumnya	
Jumlah Penambahan	1.172.623.313,02
Pengurangan :	
PDDM tahun sebelumnya yang telah menjadi pendapatan tahun 2021	973.384.983,35
Koreksi kurang salah catat saldo tahun sebelumnya	
Jumlah Pengurangan	973.384.983,35
Saldo Akhir	1.172.623.313,02

4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi bagian lancar dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran. dengan saldo per 31 Desember 2022 NIHIL.

5. Utang Belanja

Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Beban Pegawai dan Beban Barang tahun anggaran sebelumnya namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.420.180.392,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo Th. 2022	Saldo Th. 2021
Utang Belanja Pegawai	2.411.454.362,00	1.834.023.904,00
Utang Belanja Barang dan Jasa - Persediaan		
Utang Belanja Barang dan Jasa - Pemeliharaan		
Utang Belanja Barang dan Jasa - Jasa	8.726.030,00	5.786.052,00
Utang Belanja Barang dan Jasa - Perjalanan Dinas		
Utang Belanja Bunga		
Utang Belanja Subsidi		
Utang Belanja Hibah		

Uraian	Saldo Th. 2022	Saldo Th. 2021
Utang Belanja Tidak Terduga		
Utang Belanja Bagi Hasil		
Utang Belanja Bantuan Keuangan		
Utang Belanja Bantuan Sosial		
Utang Beban Lain-lain		
Jumlah	2.420.180.392,00	1.839.809.956,00

Utang Belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan :

- a. Utang Belanja Pegawai merupakan :
 - 1) Utang TPP bulan Desember 2022 sebesar Rp. 102.687.956,00
 - 2) Utang Insentif Pajak Daerah tahun 2022 yang belum dibayarkan sebesar Rp. 2.308.766.406,00
- b. Utang Belanja Jasa merupakan :
 - 1) Utang atas Belanja Telepon sebesar Rp. 43.742,00
 - 2) Utang atas Belanja Air sebesar Rp. 397.900,00
 - 3) Utang atas Belanja Listrik sebesar Rp. 4.384.388,00
 - 4) Utang atas Belanja Jasa Tenaga Administrasi/Honor Tenaga Kontrak sebesar Rp. 3.900.000,00

2. Pengurangan :

- a. Utang Belanja Pegawai merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut :
 - 1) Utang TPP bulan Desember 2021 sebesar Rp. 95.492.678,00
 - 2) Utang Insentif Pajak Daerah tahun 2021 yang dibayarkan di tahun 2022 sebesar Rp. 1.738.531.226,00
- b. Utang Belanja Jasa merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut:
 - 1) Utang atas Belanja Telepon sebesar Rp. 33.345,00
 - 2) Utang atas Belanja Air sebesar Rp. 375.300,00
 - 3) Utang atas Belanja Listrik sebesar Rp. 1.677.407,00
 - 4) Utang atas Belanja Jasa Tenaga Administrasi/Honor Tenaga Kontrak SK Bupati sebesar Rp. 3.700.000,00

6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Belanja Modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai

Utang Belanja namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2022 adalah NIHIL.

3.4.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar NIHIL.

3.4.2.3 R/K PPKD

Rekening ini merupakan rekening perantara yang digunakan oleh SKPD pada saat menerima SP2D dari BUD atau menyetor kas ke BUD. Saldo R/K PPKD sebelum konsolidasi per 31 Desember 2022 adalah sebesar NIHIL.

3.4.3 Ekuitas

Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dikuasai, setelah dikurangi hak pihak (*claim*) ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas pada Neraca Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 22.091.224.135,05 dan Rp. 18.159.108.262,11. Perubahan atas ekuitas tahun 2022 dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2022 :	NILAI (Rp)
EKUITAS AWAL	18.159.108.262,11
Surplus/(Defisit)-LO	142.161.424.720,84
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KEALAHAN MENDASAR :	
Koreksi Nilai Persediaan	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	
Lain-lain	(138.229.308.847,90)
EKUITAS AKHIR	22.091.224.135,05

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

3.5. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

Nilai surplus/(defisit) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 131.958.053.116,00. Sedangkan nilai Surplus Defisit-LO sebesar Rp. 142.161.424.720,84 sehingga memiliki perbedaan sebesar Rp. 10.203.371.604,84. Perhitungan perbedaan nilai secara keseluruhan hubungan LRA-LO dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Surplus/(Defisit) LRA	131.958.053.116,00
Penambahan	61.796.307.402,06
Pengurangan	51.592.935.797,22
Surplus/(Defisit) LO	142.161.424.720,84

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan disampaikan dalam tabel sebagai berikut:

Penambahan LRA-LO:

No	Jenis Transaksi	Uraian	Nilai (Rp)
	belanja modal	Belanja Modal Th. 2022	2.358.288.134,00
1	aset tetap	reklasifikasi beban jasa ke aset tetap PEG+	
2	aset tetap	reklasifikasi beban jasa ke aset tetap JS+	4.900.000,00
3	aset tetap	pengeluaran persediaan reklasifikasi ke Aset Tetap BHP+	
4	aset tetap	reklasifikasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap PEMEL+	67.460.000,00
5	aset tetap	pengeluaran persediaan diserahkan kepada pihak ke-3 direklasifikasi ke Aset Tetap BHP+3	
6	aset tetap	pencatatan hibah masuk aset tetap dari pemerintah pusat (.....) HBM+P	
7	aset tetap	pencatatan hibah masuk aset tetap dari pemerintah provinsi (.....)HBM+V	
8	aset tetap	pencatatan hibah masuk aset tetap dari pihak ke-3 (.....) HBM+3	179.857.000,00
9	aset tetap	pencatatan hibah masuk aset tetap dari komite sekolah HBM+KOM	
10	akumulasi penyusutan	koreksi salah catat beban penyusutan	
11	akumulasi penyusutan	penyesuaian akumulasi penyusutan penghapusan aset tetap	
12	aset lainnya	reklasifikasi beban jasa ke aset tidak berwujud	
13	penyisihan piutang	pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Jasa Ex-Dana Bergulir	
14	penyisihan piutang	pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Pokok Ex-Dana Bergulir	
15	piutang	pencatatan Piutang Jaminan Pelaksanaan (baru)	
16	piutang	pencatatan Piutang Denda Keterlambatan	
17	penyisihan piutang	pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Denda keterlambatan	

No	Jenis Transaksi	Uraian	Nilai (Rp)
18	piutang	pencatatan pembebanan Piutang TGR th 2022 a.n (SK Bupati No.....)	
19	penyisihan piutang	pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang TGR karena setoran atau pengurangan nilai piutang TGR	
20	piutang	pencatatan Piutang Pajak baru	51.081.098.766,00
21	penyisihan piutang	pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Pajak	2.666.662.269,71
22	piutang	pencatatan Piutang Denda Pajak	2.614.621.293,00
23	penyisihan piutang	pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Denda Pajak	
24	piutang	pencatatan Piutang Retribusi baru	
25	penyisihan piutang	pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Retribusi	
26	piutang	pencatatan Piutang BLUD tahun ini (baru)	
27	penyisihan piutang	pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang BLUD	
28	utang beban	pembayaran utang belanja tahun lalu	1.839.809.956,00
29	persediaan	saldo akhir Persediaan Tahun 2022	10.225.000,00
30	persediaan	mutasi keluar barang persediaan ke SKPD/Unit	
31	persediaan	reklasifikasi persediaan ke ekstrakomtabel	
32	persediaan	hibah masuk barang persediaan dari pemerintah pusat	
33	persediaan	hibah masuk barang persediaan dari pemerintah provinsi	
34	persediaan	hibah masuk barang persediaan dari lembaga/organisasi swasta	
35	persediaan	bantuan sosial barang persediaan kepada kelompok individu (tambah)	
36	persediaan	bantuan sosial barang persediaan kepada kelompok masyarakat (tambah)	
37	persediaan	bantuan sosial barang persediaan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) (tambah)	
38	persediaan	penerimaan persediaan karena reklasifikasi antar beban (tambah)	
39	persediaan	pengeluaran persediaan karena reklasifikasi antar beban (tambah)	
40	persediaan	reklasifikasi antar kode beban persediaan (tambah)	
41	persediaan	Penerimaan Beban Persediaan SKPD dari Belanja Tidak Terduga PPKD	
42	persediaan	reklasifikasi persediaan ke Kadaluarsa/Usang/Rusak	
43	BBDM	penyesuaian Beban Jasa tahun ini yang merupakan Belanja Dibayar di Muka	
44	BBDM	penyesuaian Pendapatan Diterima di Muka saldo tahun lalu yang telah menjadi Pendapatan -LO	973.384.983,35
45	beban BOS	reklasifikasi beban pegawai BOS (tambah)	
46	beban BOS	reklasifikasi beban barang dan jasa BOS (non persediaan) (tambah)	
47	beban BOS	reklasifikasi beban persediaan BOS (tambah)	
48	beban BLUD	reklasifikasi beban pegawai BLUD (tambah)	
49	beban BLUD	reklasifikasi beban barang dan jasa BLUD (non persediaan) (tambah)	
50	beban BLUD	reklasifikasi beban persediaan BLUD (tambah)	
51	beban	reklasifikasi antar beban karena salah penganggaran (tambah)	
52	eliminasi hutang/piutang	eliminasi Hutang/Piutang Pelayanan Kesehatan Jamkesda (SKTM)	

No	Jenis Transaksi	Uraian	Nilai (Rp)
53	penjualan AT PPKD	Reklasifikasi hasil penjualan aset tetap SKPD (tambah)	
54	PMPD	pencatatan Penyesuaian saldo PMPD th 2022 akibat perhitungan dengan metode ekuitas	
55	Utang Jangka Pendek	eksekusi jaminan pemeliharaan (retensi) dari utang jangka pendek ke pendapatan hasil eksekusi jaminan PPKD	
56	Beban Tidak Terduga	pengalihan Belanja Tidak Terduga PPKD ke Beban Persediaan SKPD teknis	
57	Utang DBH Pusat	pemotongan pendapatan DBH pusat untuk pembayaran Utang Lebih Bayar DBH	
58	Piutang DBH Pusat	penetapan Piutang Bagi Hasil Pajak Pusat sesuai PMK ...	
59	Piutang DBH Pusat	penetapan Piutang Bagi Hasil SDA Pusat sesuai PMK ...	
60	Piutang DBH Prov	penetapan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi TA 2021 sesuai BA Rekonsiliasi Nomor	
61	Piutang Bagian Laba BUMD	pencatatan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD Lembaga Keuangan TA 2022	
62	Piutang Bagian Laba BUMD	pencatatan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD Aneka Jasa (non lembaga keuangan)TA 2022	
63	persediaan	hibah barang persediaan kepada pemerintah pusat (tambah)	
64	akumulasi penyusutan	penyesuaian akumulasi penyusutan pindah kondisi dari rusak berat ke barang baik (B)	
		dst	
		Jumlah	61.796.307.402,06

Pengurangan LRA-LO:

No	Jenis Transaksi	Uraian	Nilai (Rp)
1	aset tetap	reklasifikasi aset tetap ke Ekstracomptable (E)	
2	aset tetap	penerimaan persediaan dari reklasifikasi Belanja Modal - BHP-	
3	aset tetap	penerimaan persediaan dari reklasifikasi Aset Tetap (hasil mutasi dari SKPD/Unit lainnya) - BHP-	
4	aset tetap	reklasifikasi Belanja Modal/Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan - PEMEL-	
5	aset tetap	reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Perjalanan Dinas - PD-	
6	aset tetap	reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Pegawai - PEG-	
7	aset tetap	reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Jasa - JS-	
8	aset tetap	Hibah Keluar Aset Tetap kepada (BAST No.....) - HB	
9	aset tetap	reklasifikasi barang diserahkan kepada pihak ke-3 pengadaan tahun 2022, salah penganggaran ke Belanja Modal - HB-3	
10	aset tetap	penghapusan barang Baik (B)/Rusak Ringan (RR) - HPS	
11	penyusutan AT	pencatatan Beban Penyusutan tahun 2022	
12	penyusutan AT	reklasifikasi antar beban penyusutan, salah kode rekening	678.162.539,00
13	aset lainnya	pencatatan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	71.719.840,00
14	aset lainnya	Penghapusan Aset Tetap atas penjualan barang RB (SK hapus no..... SK jual no	
15	aset lainnya	Penghapusan Aset Tetap atas pemusnahan barang RB (SK hapus no..... SK jual no	

No	Jenis Transaksi	Uraian	Nilai (Rp)
16	aset lainnya	Penghapusan Aset Tetap Rusak Berat tukar/menukar (SK hapus no.....)	
17	aset lainnya	Penghapusan Aset Lainnya atas barang HIBAH keluar (SK hapus no..... BAST no	
18	piutang	pengembalian piutang jasa ex-Dana Bergulir, penerimaan kas di PPKD	
19	piutang	pengembalian pokok ex-Dana Bergulir, penerimaan kas di PPKD	
20	penyisihan piut	pencatatan Penambahan Penyisihan Piutang Jasa Ex-Dana Bergulir	
21	penyisihan piut	pencatatan Penambahan Penyisihan Piutang Pokok Ex-Dana Bergulir	
22	piutang	penerimaan Piutang Jaminan Pelaksanaan, penerimaan kas di PPKD	
23	penyisihan piut	pencatatan Penambahan Penyisihan Piutang Denda keterlambatan	
24	piutang	pengurangan Bagian Lancar TGR, penerimaan kas di PPKD	
25	penyisihan piut	pencatatan Beban Penyisihan Piutang TGR	
26	piutang	penerimaan piutang pajak tahun lalu	46.225.273.818,00
27	penyisihan piut	pencatatan Penambahan Penyisihan Piutang Pajak	37.484.764,50
28	penyisihan piut	pencatatan Penambahan Penyisihan Piutang Denda Pajak	932.486.630,70
29	piutang	penerimaan piutang retribusi tahun lalu	
30	penyisihan piut	pencatatan Penambahan Penyisihan Piutang Retribusi	
31	piutang	penerimaan Piutang BLUD saldo tahun lalu	
32	piutang	pengurangan Piutang BLUD yang tidak lolos verifikasi	
33	penyisihan piut	pencatatan Penyisihan Piutang BLUD	
34	utang beban	pencatatan utang belanja tahun ini yang belum dibayar (non persediaan)	2.420.180.392,00
35	utang beban	pencatatan utang belanja tahun ini yang belum dibayar (persediaan)	
36	persediaan	koreksi saldo persediaan awal	
37	persediaan	penggunaan/pemakaian saldo Persediaan awal	55.004.500,00
38	persediaan	mutasi masuk barang persediaan dari SKPD/Unit ...	
39	persediaan	reklasifikasi persediaan ke ekstrakomtabel	
40	persediaan	hibah masuk barang persediaan dari pemerintah pusat	
41	persediaan	hibah masuk barang persediaan dari pemerintah provinsi	
42	persediaan	hibah masuk barang persediaan dari lembaga/organisasi swasta	
43	persediaan	bantuan sosial barang persediaan kepada kelompok individu (kurang)	
44	persediaan	bantuan sosial barang persediaan kepada kelompok masyarakat (kurang)	
45	persediaan	bantuan sosial barang persediaan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) (kurang)	
46	persediaan	penerimaan persediaan karena reklasifikasi antar beban (kurang)	
47	persediaan	pengeluaran persediaan karena reklasifikasi antar beban (kurang)	
48	persediaan	reklasifikasi antar kode beban persediaan (kurang)	

No	Jenis Transaksi	Uraian	Nilai (Rp)
49	persediaan	Penerimaan Beban Persediaan SKPD dari Belanja Tidak Terduga PPKD	
50	persediaan	reklasifikasi persediaan ke Kadaluarsa/Usang/Rusak	
51	BBDM	penyesuaian Belanja Dibayar di Muka tahun lalu yang telah menjadi Beban Jasa	
52	PPDM	penyesuaian Pendapatan -LO tahun ini yang merupakan Pendapatan Diterima di Muka	1.172.623.313,02
53	Beban BOS	reklasifikasi beban pegawai BOS (kurang)	
54	Beban BOS	reklasifikasi beban barang dan jasa BOS (non persediaan) (kurang)	
55	Beban BOS	reklasifikasi beban persediaan BOS (kurang)	
56	Beban BLUD	reklasifikasi beban pegawai BLUD (kurang)	
57	Beban BLUD	reklasifikasi beban barang dan jasa BLUD (non persediaan) (kurang)	
58	Beban BLUD	reklasifikasi beban persediaan BLUD (kurang)	
59	Beban	reklasifikasi antar beban karena salah penganggaran (kurang)	
60	Kas	penyesuaian atas setoran kas di bendahara penerimaan ke Kas Daerah	
61	eliminasi hutang/piutang	eliminasi Hutang/Piutang Pelayanan Kesehatan Jamkesda (SKTM)	
62	Penjualan AT PPKD	reklasifikasi hasil penjualan aset tetap SKPD (kurang)	
63	Penerimaan TGR PPKD	penerimaan piutang TGR Khusus PPKD	
64	Penerimaan TGR PPKD	penerimaan aset lainnya TGR Khusus PPKD	
65	Utang DBH Pusat	pencatatan Utang Lebih Bayar DBH sesuai Perdirjen PK no	
66	Piutang DBH Pusat	penerimaan Piutang Bagi Hasil Pajak Pusat	
67	Piutang DBH Pusat	penerimaan Piutang Bagi Hasil SDA Pusat	
68	Penyisihan Piutang DBH Pusat	pencatatan Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak/SDA Pusat	
69	Piutang DBH Prov	penerimaan piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	
70	Penyisihan Piutang DBH Prov	pencatatan Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	
71	Piutang Bagian Laba BUMD	penerimaan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD Lembaga Keuangan TA 2021	
72	Piutang Bagian Laba BUMD	penerimaan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD Aneka Jasa (non lembaga keuangan) TA 2021	
73	Penyisihan Piutang Laba BUMD	pencatatan penyisihan piutang bagian laba/deviden atas PMPD pada BUMD	
74	Persediaan	hibah keluar barang persediaan kepada pemerintah pusat	
75	Uang Muka	pencatatan Penambahan Penyisihan Uang Muka	
		dst	
		Jumlah	51.592.935.797,22

3.5.1. Penjelasan masing-masing pos terkait perbedaan pengakuan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

3.5.1.1. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA

Pendapatan Daerah	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	157.604.966.028,33	150.333.758.117,00	7.271.207.911,33
Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan			-
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			-
Jumlah	157.604.966.028,33	150.333.758.117,00	7.271.207.911,33

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Selisih antara Pendapatan Asli Daerah-LO dengan Pendapatan Asli Daerah-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
PENDAPATAN ASLI DAERAH	157.604.966.028,33	150.333.758.117,00	(7.271.207.911,33)

a. Pendapatan Pajak Daerah

Selisih antara Pendapatan pajak-LO dengan pendapatan pajak-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Pajak Daerah	157.604.966.028,33	150.333.758.117,00	(7.271.207.911,33)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang pajak th. 2022	53.695.720.059,00
Penambahan koreksi catat ...	
Penambahan pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya	973.384.983,35
Pengurangan atas pembayaran piutang tahun sebelumnya	46.225.273.818,00
Pengurangan koreksi catat ...	
Pengurangan yang merupakan pendapatan diterima dimuka	1.172.623.313,02
Selisih	7.271.207.911,33

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Selisih antara pendapatan retribusi-LO dengan pendapatan retribusi-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Retribusi Daerah			

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			

d. Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Lain-lain PAD yang Sah			

2. PENDAPATAN TRANSFER

Selisih Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional dan LRA

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Transfer Antar Daerah			

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

a. Pendapatan Hibah

Selisih antara Pendapatan Hibah-LO dengan Pendapatan Hibah-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Hibah-LO	179.857.000,00	0	(179.857.000,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat th. 2021	
Penambahan piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya/Prov th. 2021	
Penambahan piutang Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri th. 2022	
Penambahan piutang Sumbangan Pihak ketiga/sejenis th. 2022	
Penambahan Hibah Masuk Persediaan	
Penambahan Hibah Masuk Aset Tetap	179.857.000,00
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat th. 2022	

Uraian	(Rp)
Pengurangan atas penerimaan piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya/Prov th. 2022	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri th. 2022	
Pengurangan atas penerimaan piutang Sumbangan Pihak ketiga/sejenis th. 2022	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	179.857.000,00

b. Dana Darurat

Selisih antara Dana Darurat-LO dengan Dana Darurat-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Dana Darurat-LO			

c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Selisih antara Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO dengan Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO			

4. SURPLUS NON OPERASIONAL

a. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

1) Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			

2) Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			

3) Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			

4) Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO			

b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

1) Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO			

2) Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO			

3) Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO			

4) Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO			

5) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO			

3.5.1.2. Pengungkapan Perbedaan Beban-LO dengan Belanja-LRA

3.5.1.2.1. Beban Operasi

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pegawai	10.348.305.584,00	9.770.875.126,00	(577.430.458,00)
Beban Barang dan Jasa	6.221.901.219,00	6.246.541.741,00	24.640.522,00
Beban Bunga			-
Beban Subsidi			-
Beban Hibah			-
Beban Bantuan Sosial			-
Beban Penyisihan Piutang	969.971.395,20		(969.971.395,20)
Beban Lain-lain	749.882.379,00		(749.882.379,00)
Jumlah	18.290.060.577,20	16.017.416.867,00	(2.272.643.710,20)

1. Beban Pegawai

Selisih Beban Pegawai pada LO dan Belanja Pegawai pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.945.914.084,00	1.945.914.084,00	-

b. Beban Tambahan Penghasilan ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.377.657.928,00	1.370.462.650,00	(7.195.278,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Tambahan Penghasilan ASN th. 2022	102.687.956,00
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Tambahan Penghasilan ASN	95.492.678,00
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	7.195.278,00

c. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.378.615.959,00	4.901.651.392,00	(476.964.567,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN th. 2022	1.773.973.793,00
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.297.009.226,00
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	476.964.567,00

d. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD			

e. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.646.117.613,00	1.552.847.000,00	(93.270.613,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH th. 2022	534.792.613,00
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	441.522.000,00
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	93.270.613,00

f. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH			

g. Beban Pegawai BOS

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pegawai BOS			

h. Beban Pegawai BLUD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pegawai BLUD			

2. Beban Barang dan Jasa

Selisih beban barang dan jasa pada LO dengan belanja barang dan jasa pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Persediaan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Barang	1.692.708.033,00	1.647.928.533,00	(44.779.500,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Saldo Awal	55.004.500,00
Penambahan Reklas dari Belanja Tak Terduga	
Penambahan Reklas Belanja Modal	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Mutasi Masuk	
Penambahan Hibah Masuk	

Uraian	(Rp)
Penambahan Hutang Persediaan	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Persediaan	
Pengurangan Saldo Akhir	10.225.000,00
Pengurangan Mutasi Keluar	
Pengurangan Hibah Keluar	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Ekstrakomptabel	
Pengurangan Reklas ke B. Pegawai	
Pengurangan Reklas ke B. Jasa	
Pengurangan Reklas ke B. Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Kadaluarsa/Usang/Rusak	
Selisih	44.779.500,00

b. Beban Jasa

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Jasa	3.099.918.728,00	3.101.878.750,00	1.960.022,00

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Jasa	8.726.030,00
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Reklas dari Beban Dibayar di Muka\	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Jasa	5.786.052,00
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	4.900.000,00
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Dibayar di Muka	
Selisih	(1.960.022,00)

c. Beban Pemeliharaan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan	206.827.880,00	274.287.880,00	67.460.000,00

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Pemeliharaan	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	

Uraian	(Rp)
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	67.460.000,00
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Selisih	(67.460.000,00)

d. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Perjalanan Dinas	1.222.446.578,00	1.222.446.578,00	-

e. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			

f. Beban Barang dan Jasa BOS

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Barang dan Jasa BOS			

g. Beban Barang dan Jasa BLUD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Barang dan Jasa BLUD			

h. Beban Barang dan Jasa BLUD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Barang dan Jasa BLUD			

3. Beban Bunga

Selisih beban bunga LO dengan belanja bunga pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat			

b. Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain			

c. Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)			

d. Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)			

e. Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat			

f. Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD - Jangka Pendek

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Pendek			

g. Beban Bunga Utang Pinjaman

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang Pinjaman			

4. Beban Subsidi

Selisih beban subsidi LO dengan belanja subsidi pada LRA dijelaskan sebagai berikut:

a. Beban Subsidi kepada BUMN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Subsidi kepada BUMN			

b. Beban Subsidi kepada BUMD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Subsidi kepada BUMD			

c. Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta			

d. Beban Subsidi kepada Koperasi

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Subsidi kepada Koperasi			

5. Beban Hibah

Selisih Beban Hibah LO dengan Belanja Hibah pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat			

b. Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya			

c. Beban Hibah kepada BUMN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah kepada BUMN			

d. Beban Hibah Uang kepada BUMD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah Uang kepada BUMD			

e. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia			

f. Beban Hibah Dana BOS

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah Dana BOS			

g. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik			

6. Beban Penyisihan Piutang

Selisih Beban Penyisihan Piutang LO dengan LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	37.484.764,50	-	(37.484.764,50)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	37.484.764,50
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah atas penerimaan piutang	
Selisih	37.484.764,50

b. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah			

c. Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan			

d. Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	932.486.630,70		(932.486.630,70)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan BLUD	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Hasil Eksekusi Atas Jaminan	

Uraian	(Rp)
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Pokok)	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Jasa)	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - TP-TGR	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Denda Pajak Daerah	932.486.630,70
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Denda Retribusi Daerah	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang BLUD	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Hasil Eksekusi Atas Jaminan	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Pokok)	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Jasa)	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang TPTGR	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	
Selisih	932.486.630,70

e. Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat			

f. Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah			

g. Beban Penyisihan Piutang Lainnya

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Lainnya			

3.5.1.2.2. Beban Penyusutan Dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran.

1. Beban Penyusutan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	649.379.611,00	-	(649.379.611,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.782.928,00	-	(28.782.928,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi			-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			-
Beban Penyusutan Aset Lainnya			-
Jumlah	678.162.539,00	-	(678.162.539,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	-
Penambahan Beban Penyusutan th. 2022	678.162.539,00
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (tambah)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (kurang)	
Selisih	678.162.539,00

2. Beban Amortisasi

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	71.719.840,00	-	(71.719.840,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Amortisasi th. 2022	71.719.840,00
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (tambah)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (kurang)	
Selisih	71.719.840,00

3.5.1.2.3. Beban Transfer

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bagi Hasil			
Beban Bantuan Keuangan			
Jumlah			

1. Beban Bagi Hasil

Selisih Beban Bagi Hasil LO dan Belanja Bagi Hasil LRA adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa			
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa			
Jumlah			

2. Beban Bantuan Keuangan

Selisih Beban Bantuan Keuangan LO dan Belanja Bantuan Keuangan LRA adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi			
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota			
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota			
Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi			
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa			
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota			
Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik			
Jumlah			

3.5.1.2.4. Beban Tidak Terduga

Selisih Beban Tidak Terduga LO dan Belanja Tidak Terduga LRA sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Tidak Terduga			

3.5.1.2.5. Defisit Non Operasional

1. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Selisih Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO dengan LRA sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO			
Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			
Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO			
Jumlah			

2. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

Selisih Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO dengan LRA sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO			
Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO			
Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO			
Defisit Penyelesaian Obligasi-LO			
Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO			
Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO			
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO			
Jumlah			

BAB IV**PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN****4.1 UMUM**

Kabupaten Brebes memiliki eksistensi untuk membangun kompetensi daerah yang berbeda saing dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki meliputi sumber daya manusi, ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.

Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pajak daerah dan retribusi, PBB dan BPHTB.

Adapun **fungsi** Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, adalah sebagai berikut :

- a. penetapan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pendapatan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
- c. pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
- d. pengkoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub pendapatan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 tahun 2016 tentang tugas fungsi dan uraian tugas jabatan struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan;
 - b. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan;
 - c. Sub Bidang Pelaporan dan Pemeriksaan.
4. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari;
 - a. Sub Bidang Penagihan, Pelaporan dan Penindakan;
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan;
 - c. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Unit Pelaksana Teknis.

4.3 PERSONALIA

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes terdiri dari 1 jabatan Kepala Badan (pejabat eselon II.b), 1 sekretaris (eselon III.a), 2 Kepala Bidang (eselon III.b), 2 kepala sub bagian dan 6 Analis Keuangan Pusat dan Daerah (eselon IV.a).

Jumlah keseluruhan pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam tahun 2022 sebanyak 5 orang, tersebar dalam 1 sekretariat dan 2 bidang, yaitu:

Bidang	Jumlah Pegawai		
	PNS	Tenaga Kontrak	Tenaga Harian Lepas
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekretariat	10	-	7
Bidang Pajak Daerah dan Retribusi	9	1	9
Bidang PBB dan BPHTB	8	1	9
Jumlah	27	2	25

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Desember, 2022)

BAB V
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2022. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES



SUBANDI, S.E., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19690711 199103 1 010